

## DAFTAR PUSTAKA

- Arniati, Imelda dan Ely Kartikaningdyah. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Politik Penganggaran, Perencanaan Dan Informasi Pendukung Terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD Dengan Dokumen KUA-PPAS Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIII 16-17 Oktober di Purwokerto, 2010).
- Andrianto, Muh. 2011. Evaluasi Penyusunan Anggaran dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah : Studi Kasus pada Pemerintah Daerah karang Anyar.
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta.
- Conyers, Diana dan Hill, Peter. 1984. *An introduction to Development Planning in Third World, The Pitman Press Ltd, Scotland.*
- Departemen Dalam Negeri. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .
- Haryanto. 2008. Perencanaan dan Penganggaran, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Iskandar, Dudi, Rina Bukit dan Idhar Yahya. 2013. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran dan Politik Penganggaran, dengan Transparansi Publik sebagai Variabel Moderating terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA - PPAS Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, Jurnal Telaah & Riset Akuntansi.
- Kementerian Keuangan. 2014. Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Lan, Zhiyong and Rosenbloom, David H. 1992. Editorial, *Public Administration Review*, 52
- Mahmudi, 2009, Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Studi Kasus Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Tesis)
- Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik, Andi, Yogyakarta.

Nordiawan, Deddi, 2006. Akuntansi Sektor Publik , Edisi Jilid Pertama, Salemba Empat, Jakarta.

Osborne, David and Gaebler, T. 1992. *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector*, New York: Penguins Books.

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

\_\_\_\_\_. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pollit, Christopher. 1993. *Managerialism and the Public Service: Cuts or Cultural Change in 1990s*, 2<sup>nd</sup> Ed., Oxford: Basil Blackwell.

Raco, J.R. 2010. Metode Penelitian Kualitatif, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Rahayu, Sri. 2007. Studi Fenomenologis terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah (Bukti Empiris dari Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Jambi) (Simposium Nasional Akuntansi X).

Rasyid, Abdul. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sinkronisasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Jurnal FuturE Universitas Yapis Papua).

Robbins, Stephen P and Coulter, Mary. 2002. *Management*, Seven Edition, Pearson Education.

Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sobari, Wawan. 2007. Peningkatan Partisipasi Publik di Era Otonomi Daerah-Masih Sebatas Instrumen. Artikel pada berita Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah (YIPD), Jakarta.

Sjafrizal. 2014. Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Reformasi, Rajagrafindo Persada, Jakarta. Sumatera Barat Tahun 2011-2014 (Tesis)

Sugiarto, Bowo. 2010. Membuka Diri Setengah Hati : Ruang Keterlibatan Warga dalam Penyusunan APBD (Jurnal UNAIR. Tahun 2010, Volume 23, Nomor 4.

Tyas, Meita Ratna Ning. 2015 Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Bidang Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

\_\_\_\_\_ Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

\_\_\_\_\_ Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

\_\_\_\_\_ Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

\_\_\_\_\_ Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Wangi, Chitra Ariesta Pandan & Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan Dalam Penyusunan APBD (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2008-2010) (Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIII 16-17 Oktober di Purwokerto, 2010)

Yuniarti, Elisabeth. 2011. <http://bappeda.cianjurkab.go.id/Download/View/114.html> diakses tanggal 28 Juli 2015)

<http://www.antaranews.com/berita/341451/kpk--celah-korupsi-mulai-dari-perencanaan> diakses tanggal 28 Juli 2015.

<http://www.antarakalbar.com/berita/306345/kpk-beberkan-kerawanan-munculnya-korupsi-dalam-apbd> diakses tanggal 1 Agustus 2015.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/12/09/mxj1f1-sby-paparkan-fenomena-baru-korupsi-di-indonesia>, diakses tanggal 1 Agustus 2015.

<http://www.bpkp.go.id/sulut/berita/read/12810/0/KPK-dan-BPKP-Sosialisasikan-APBD-Pro-Rakyat-di-Bumi-Nyiur-Melambai.bpkp> diakses tanggal 3 Agustus 2015